

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterlambatan waktu dalam pelaksanaan konstruksi merupakan suatu kejadian yang tidak jarang terjadi pada setiap proyek, yang mengakibatkan kemunduran waktu sehingga mengurangi keuntungan yang telah ditargetkan oleh owner maupun kontraktor pelaksana. Keterlambatan waktu juga dapat disebabkan oleh buruknya manajemen proyek yang diterapkan dan juga kesalahan-kesalahan sumber daya manusia di dalamnya (Najah, 2018).

Keterlambatan atau ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan konstruksi adalah sebuah isu global. Di Indonesia, ketidaktepatan waktu ini merupakan contoh masalah yang sering terjadi di setiap pekerjaan. Pekerjaan konstruksi melibatkan kontraktor, pemilik proyek atau owner, konsultan perencana dan konsultan pengawas yang saling terkait dalam suatu perjanjian kerja (kontrak). Dalam pelaksanaannya, sering terjadi hambatan dalam interaksi kerja. Hambatan-hambatan tersebut menjadi penyebab tertundanya pelaksanaan pekerjaan (Stephanie, 2022).

Studi terdahulu mengindikasikan bahwa keterlambatan proyek terkait dengan keterlambatan pembayaran kepada kontraktor (Badawy dkk., 2020). Keterlambatan proyek konstruksi dalam hal ini didefinisikan sebagai terlewatnya target waktu yang direncanakan untuk penyelesaian suatu proyek sesuai dengan kontrak dari waktu yang disepakati oleh pemangku kepentingan (Desyllia dkk., 2014). Sedangkan keterlambatan pembayaran pada proyek diartikan sebagai tidak terpenuhinya termin waktu pembayaran yang telah direncanakan dan disepakati

oleh *owner* kepada kontraktor (Peters dkk., 2019). Pembayaran yang terlambat akan membuat *cashflow* proyek menjadi negatif sehingga hal ini memiliki efek yang besar pada semua pemangku kepentingan (Badawy dkk., 2020). Penyebab keterlambatan pembayaran tersebut antara lain adalah kondisi keuangan klien dan manajemen bisnis yang buruk, penundaan pembayaran oleh klien, klaim kontraktor yang tidak valid, keterlambatan penilaian dan sertifikasi pembayaran interim oleh konsultan, ketidakakuratan penilaian progres pekerjaan, dokumentasi dan informasi yang tidak memadai untuk penilaian, progress pekerjaan yang belum mencapai target dan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai, proses sertifikasi yang berbelit-belit, evaluasi progres pekerjaan yang terlalu banyak oleh konsultan, terjadi salah tafsir antara keinginan *owner* dengan pemahaman kontraktor, (Abdullah dkk., 2014).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran sentral dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi. Dalam konteks ini, PPK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan perencanaan, anggaran, dan standar kualitas yang ditetapkan. PPK juga diharapkan dapat mengidentifikasi potensi risiko dan mengetahui lebih dini jika terjadinya keterlambatan pekerjaan dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari keterlambatan pekerjaan tersebut serta kegagalan proyek.

“Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis”, kutipan di atas diambil dari SSUK dokumen kontrak standar jasa konstruksi, dan juga terdapat pada Permen PUPR nomor

07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Berdasarkan uraian diatas maka laporan ini dibuat bertujuan untuk mendalami peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengatasi keterlambatan pekerjaan pada proyek Penanganan Longsegment Jalan Batusangkar – Ombilin (P.070) DAK. Dengan memahami peran kritis PPK, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas manajemen proyek dan mengurangi risiko keterlambatan dan kegagalan proyek.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi penyebab keterlambatan pekerjaan pada proyek penanganan longsegment jalan Batusangkar – Ombilin (P.070) DAK.
2. Langkah-langkah yang dilakukan Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengatasi keterlambatan pekerjaan pada proyek penanganan longsegment jalan Batusangkar – Ombilin (P.070) DAK.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penulisan laporan ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan pekerjaan pada proyek penanganan longsegment jalan Batusangkar – Ombilin (P.070) DAK.

2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengatasi keterlambatan pekerjaan pada proyek penanganan longsegment jalan Batusangkar – Ombilin (P.070) DAK.

1.4. Batasan Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis menetapkan batasan-batasan penulisan sebagai berikut:

1. Penulisan laporan ini dibatasi pada proyek penanganan longsegment jalan Batusangkar – Ombilin (P.070) DAK.
2. Penulisan laporan ini difokuskan pada penyebab keterlambatan suatu proyek dan langkah-langkah yang dilakukan PPK dalam mengatasi keterlambatan pada proyek penanganan longsegment jalan Batusangkar – Ombilin (P.070) DAK.

1.5. Manfaat Penulisan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan maka penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk penulis dapat dijadikan acuan atau bahan panduan ketika menemukan pekerjaan yang terkait dengan judul laporan.
2. Untuk pendidikan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek dan peran serta langkah-langkah yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengatasi keterlambatan proyek.
3. Untuk pemerintah dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak pemerintah mengenai peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengatasi keterlambatan proyek.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman tesis ini, maka penyajiannya disusun berdasarkan beberapa bab yang sistematis, yaitu :

Bab 1 Pendahuluan

Menguraikan secara singkat mengenai gambaran umum dari penulisan laporan yang dilakukan. Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Landasan Teori

Menyajikan materi-materi yang berkaitan dengan penulisan laporan yang akan dilakukan.

Bab 3 Metodologi Penulisan

Bab ini menjelaskan kerangka pikiran dan tahap-tahap penyelesaian masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah sekaligus menjamin konsistensi pembahasan yang dibuat.

Bab 4 Analisis dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penulisan yang diperoleh pada saat dilakukannya pengumpulan data di lapangan. Hasil penulisan yang diperoleh dilengkapi dengan analisis dan pembahasan guna menjawab rumusan masalah dan dapat mencapai tujuan penulisan yang dilakukan.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan hasil akhir yang diperoleh dalam penulisan yang menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan

pembahasan serta saran-saran yang dapat diambil sebagai tindak lanjut dimasa yang akan datang.

